

**ANALYSIS OF THE USE OF SESKEUDES, HUMAN RESOURCE  
COMPETENCE, AND GOVERNMENT INTERNAL CONTROL SYSTEM ON THE  
ACCOUNTABILITY OF VILLAGE REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET  
MANAGEMENT WITH EDUCATION LEVEL AS A MODERATING VARIABLE**

**ANALISIS PENGGUNAAN SESKEUDES, KOMPETENSI SUMBER DAYA  
MANUSIA DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DENGAN TINGKAT PENDIDIKAN  
SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

**Boki Anggara<sup>1</sup>, Ratih Kusumastuti<sup>2</sup>, Muhammad Gowon<sup>3</sup>**

Program Studi Magister Ilmu Akuntansi Pascasarjana Universitas Jambi<sup>1,2,3</sup>

[bokianggara87@gmail.com](mailto:bokianggara87@gmail.com)<sup>1</sup>, [ratihkusumastuti@unja.ac.id](mailto:ratihkusumastuti@unja.ac.id)<sup>2</sup>, [gowon@unja.ac.id](mailto:gowon@unja.ac.id)<sup>3</sup>

**ABSTRACT**

*Accountability is very important thing in effort be accountable activities that have been done a entity as form accountability to shareholders. Research This aiming For know whether There is positive and significant influence between seskeudes , competence source Power humans , and systems internal government control to accountability management Village Budget through level education as variable moderation. Population in study This is device a village consisting of from Village Head , Village Secretary and Village Treasurer in the Village Government in scope of Sungai Penuh City as many as 180 respondents . Where all of them Respondent made into sample in study This . The data collection method is questionnaire . Data analysis techniques in study This namely statistics descriptive with inner model and outer model tests using Partial Least Squares - Structural Equation Model (PLS-SEM). Based on results study This show that Seskeudes influential positive and significant to Accountability management Village Budget with level significance  $0.005 < 0.05$  then Hypothesis I is accepted. Competence source Power man influential positive and significant to Accountability management Village Budget with level significance  $0.000 < 0.05$  then Hypothesis II is accepted. System internal control has an effect positive and significant to Accountability management Village Budget with level significance  $0.000 < 0.05$  then Hypothesis III is accepted. Seskeudes influential positive and negative significant to Accountability management Village Budget through level education as variable moderation with level significance  $0.764 > 0.05$  then Hypothesis IV is rejected. Competence source Power man influential positive and negative significant to Accountability management Village Budget through level education as variable moderation with level significance  $0.590 > 0.05$  then hypothesis V is rejected. SPIP has an effect positive and negative significant to Accountability management Village Budget through level education as variable moderation with significance  $0.811 > 0.05$  then Hypothesis VI is rejected. Conclusion from study This is show that seskeudes, competence source Power humans, and systems internal government control influential positive and significant to accountability management APBDes. management seskeudes, competence source Power humans, and systems internal government control influential positive and negative significant to accountability management Village Budget through level education as variable moderation.*

**Keywords** : Seskeudes , Competence Human Resources , Systems Internal Control , Accountability Management APBDes , Level Education , PLS-SEM.

**ABSTRAK**

Akuntabilitas merupakan hal yang sangat penting dalam upaya mempertanggungjawabkan kegiatan yang telah dilakukan suatu entitas sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada shareholders. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang positif dan signifikan antara seskeudes, kompetensi sumber daya manusia, dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan APBDes melalui tingkat pendidikan sebagai variabel moderasi. Populasi dalam penelitian ini adalah perangkat desa yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris dan Bendahara Desa di Pemerintah Desa dalam lingkup Kota Sungai Penuh sebanyak 180 Responden. Dimana seluruh responden dijadikan sampel dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data yaitu kuesioner. Teknik analisis data dalam penelitian ini yakni statistik deskriptif dengan uji inner model dan outer model menggunakan Partial Least Squares - Structural Equation Model (PLS-SEM). Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Seskeudes berpengaruh

positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas pengelolaan APBDes dengan tingkat signifikansi  $0.005 < 0.05$  maka hipotesis I diterima. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas pengelolaan APBDes dengan tingkat signifikansi  $0.000 < 0.05$  maka hipotesis II diterima. Sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas pengelolaan APBDes dengan tingkat signifikansi  $0.000 < 0.05$  maka hipotesis III diterima. Seskeudes berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Akuntabilitas pengelolaan APBDes melalui tingkat pendidikan sebagai variabel moderasi dengan tingkat signifikansi  $0.764 > 0.05$  maka hipotesis IV ditolak. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Akuntabilitas pengelolaan APBDes melalui tingkat pendidikan sebagai variabel moderasi dengan tingkat signifikansi  $0.590 > 0.05$  maka hipotesis V ditolak. SPIP berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Akuntabilitas pengelolaan APBDes melalui tingkat pendidikan sebagai variabel moderasi dengan signifikansi  $0.811 > 0.05$  maka hipotesis VI ditolak. Simpulan dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa seskeudes, kompetensi sumber daya manusia, dan sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan APBDes. pengelolaan seskeudes, kompetensi sumber daya manusia, dan sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan APBDes melalui tingkat pendidikan sebagai variabel moderasi.

**Kata Kunci** : Seskeudes, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, Akuntabilitas Pengelolaan APBDes, Tingkat Pendidikan, PLS-SEM

## PENDAHULUAN

Pemerintahan Kota/Kabupaten di Indonesia merupakan lembaga sah yang mengatur pemerintahan yang berdasarkan hati nurani rakyat. Oleh karena itu, masyarakat Kota Sungai Penuh meyakini jalannya pemerintahan yang telah berjalan selama empat tahun ini sudah sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan legal, jauh dari pungutan liar dan penggunaan anggaran untuk kepentingan bersama.

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan keuangan desa digambarkan sebagai sebuah kegiatan mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban mengenai pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, dalam mengelola dana desa (DD), pemerintah desa diharuskan bekerja dengan baik berdasarkan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas (Martini et al., 2019). APBDes merupakan alat penting untuk

menentukan pelaksanaan dan tata kelola yang tepat di wilayah desa. Ukuran pengelola yang baik tercermin dari pada penyusunan dan pertanggungjawaban APBDes. Dalam pengelolaan pemerintahan, penting untuk memahami seluruh tahapan pengelolaan APBDes.

Akuntabilitas merupakan prinsip tata kelola yang penting dan memerlukan pengikut : memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap program kerja pemerintah (Nur et al., 2019). Hal ini dan semakin maraknya kasus penggelapan dana desa hingga saat ini, menunjukkan belum terlaksananya tanggung jawab pengelolaan dana desa dengan baik. Faktanya, penyediaan dana desa untuk mendorong kemandirian desa tidak berjalan sebagaimana mestinya karena digunakan oleh oknum tertentu yang menyalahgunakan dana tersebut melalui korupsi, kolusi, dan nepotisme. Berikut adalah beberapa dari kasus penyalahgunaan dana desa oleh perangkat desa dalam lingkup Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci

**Tabel 1. Penyalahgunaan Dana Desa**

No	Tahun	Desa	Kerugian (Rp)
1.	2021	Air Teluh	310 Juta
2.	2021	Koto Pudung	452 Juta
3.	2022	Sungai Lebu	617 Juta
4.	2023	Desa Siulak Kecil	650 Juta

Sumber : Kejari Kota Sungai Penuh

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat beberapa kasus korupsi dana desa yang dilakukan oleh aparatur desa. Berdasarkan hal tersebut, Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Sungai Penuh menetapkan mantan Kepala Desa dan Sekretaris Desa Air Teluh, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, Jambi, sebagai tersangka dalam kasus dugaan Korupsi Penggunaan Anggaran Dana Desa (DD) Desa Air Teluh Kecamatan Kumun Debai, Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung tahun Anggaran 2017–2018 dan telah dilakukan penahanan pada hari Rabu, 10 November 2021. Penyidik juga menemukan adanya pengeluaran tanpa bukti pertanggungjawaban (SPJ). Selain itu, terdapat kekurangan jumlah tenaga kerja manual dan kelebihan pembayaran gaji kepada lembaga-lembaga yang tidak dapat dijelaskan, sehingga menyebabkan kerugian negara sekitar 310 Juta Rupiah (Sumber: tvonenews.com).

Pada tahun yang sama, mantan Kepala Desa dan mantan Bendahara Desa Koto Pudung di Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, ditangkap polisi Kerinci. Pasangan ini ditangkap Tim Korupsi Polisi Kerinci pada Jumat sore (12 Oktober 2021). Kapolres Kerinci AKBP Agung Wahyu Nugroho SIK melalui Direktur Reserse Kriminal IPTU Eddy Mardi SEMH mengumumkan total kerugian negara akibat perbuatan kedua tersangka sebesar Rp452 juta. Berdasarkan temuan tersebut, para tersangka tidak melakukan pengembalian dana apapun ke kas negara. Kabar terkini, hasil pemeriksaan Kejaksaan Negeri Sungai Penuh dan keterangan dari Kasi Pidsus mantan Kepala Desa Siulak Kecil ditetapkan sebagai tersangka di desa tersebut, korupsi dana desa dengan

membuat SPJ Fiktif dan markup dana kegiatan pada penggunaan Dana Desa tahun 2021 dengan kerugian negara sebesar 650 juta rupiah dan telah ditahan oleh Kejari pada hari Selasa, 24 Oktober 2023.

Dari kasus-kasus tersebut dapat kita simpulkan kasus penggelapan dana desa hampir ada di setiap tahunnya. Hal itu dikarenakan kurangnya tanggungjawab dan kompetensi aparatur desa pada saat mengelola dana desa yang telah diperoleh. Banyaknya penggelapan dana desa merupakan permasalahan yang terus berlanjut menjadi tantangan yang besar bagi pemerintahan dan memerlukan perhatian segera untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hal ini mengharuskan pemerintah untuk melakukan audit secara menyeluruh tidak hanya terhadap desa-desa yang telah dilaporkan, tapi juga terhadap pada desa lainnya. Hal tersebut akan memastikan bahwa dana desa didistribusikan dengan benar, digunakan dan tidak disalahgunakan, serta terjaminnya kepemimpinan dan pengawasan. Pemerintah desa masih perlu mengelola keuangan desa secara bertanggung jawab.

Menurut pengamatan peneliti, desa-desa di wilayah Kota Sungai Penuh banyak tidak memberikan tanggung jawab pengelolaan keuangan desa kepada pemerintah daerah melalui media informasi, sehingga pemerintah daerah mempunyai informasi yang akurat mengenai pengelolaan dan pemanfaatan desa. Dari banyaknya kasus yang ada, terdapat bukti bahwa akuntabilitas pada pengelolaan dana desa di wilayah perkotaan Sungai Penuh masih rendah. Sistem informasi yang cukup dan peran aparatur desa yang profesional merupakan s kunci berhasil tidaknya pengelolaan dana desa. Penerapan sistem dana desa diharapkan dapat mengurangi

terus terjadinya kasus penggelapan dana desa. Sistem keuangan desa merupakan catatan proses keuangan yang terjadi di desa harus memiliki catatan. Dilanjutkan dengan pencatatan serta pelaporan penggunaan dana, yang berisi informasi berupa laporan keuangan yang digunakan oleh pemangku kepentingan terkait dengan kebutuhan desa.

Pemerintah harus tegas mencegah terjadinya penggelapan dana desa agar tidak terus berdampak buruk bagi daerah dan masyarakat Dwita Eprilsa et al. (2022), mengungkapkan bahwa pencegahan fraud yang dilakukan pemerintah adalah dengan menyediakan sistem informasi akuntansi khusus pengelolaan keuangan desa yaitu Sistem Keuangan Desa atau biasa disebut dengan SISKEUDES Penerapan SISKEUDES meningkatkan kualitas desa, memungkinkan terciptanya pelaporan keuangan yang baik mengikuti prosedur serta memudahkan pelaporan akuntabilitas. Urgensinya semakin diperkuat dengan banyaknya keunggulan Siskudes dalam mengelola keuangan desa.

Menurut Budiana et al. (2019), Rifa'i et al. (2021), dan D. Puspa & Prasetyo (2020), kompetensi perangkat desa mempengaruhi pengelolaan dana desa. Kompetensi sumber daya manusia menjadi faktor kunci yang mendorong pemenuhan akuntabilitas secara keseluruhan mengingat kompetensi dianggap sebagai faktor internal dan membentuk kinerja menjadi lebih baik Hal ini berbeda riset akuntabilitas pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Luthfiani et al. (2020) serta Yunni et al. (2022), dimana kompetensi aparat desa tidak memberikan dampak signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sehingga studi ini, penulis mengeksplorasi suatu daerah di Kecamatan Pesisir Bukit, karena daerah tersebut memiliki potensi pada

sektor tani dan perabotan. Oleh karena itu, penulis ingin mengkaji tata kelola APBDes di Kota Sungai Penuh dan pengaruh pelaksanaan APBDes bagi masyarakat. Pelaksanaan APBDes di Kecamatan Pesisir Bukit salah satu Kecamatan di Kota Sungai Penuh masih memiliki beberapa kendala. Termasuk di dalamnya personel SDM yang mengelola laporan pertanggungjawaban APBDes, namun hal ini kurang memadai dan masyarakat tidak terlalu peduli dengan pendanaan APBDes.

Implementasi aplikasi SISKEUDES untuk penggunaan seluruh desa. Hasil riset Arfiansyah et al. (2020) menunjukkan bahwa implementasi SISKEUDES berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Di sisi lain, pada pengelolaan dana desa diperlukan suatu sistem untuk mewujudkan pengelolaan dana desa yang bertanggung jawab (DD), yaitu sistem pengendalian internal (Martini et al., 2019). Pasalnya, menurut Arfiansyah et al. (2020), sistem pengelolaan dapat mempengaruhi penarikan keputusan dan keamanan yang cukup terhadap pelaksanaan dimana pemerintah desa mengelola dana desa. Sistem pengendalian dapat mengendalikan aktivitas pengelolaan pemerintahan desa agar mematuhi peraturan. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa SPIP berpengaruh terhadap pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa, hal ini bertolak belakang dengan riset (Santoso et al., 2022)

Elemen lainnya yang diperlukan untuk memenuhi akuntabilitas atau mengelola sumber daya desa secara bertanggung jawab adalah kompetensi sumber daya manusia. Aspek kompetensi menjadi hal yang harus dimiliki oleh aparat pengelola anggaran desa agar akuntabilitas dapat terlaksana dengan baik (Fajri et al., 2021). Hal tersebut dikarenakan diperlukan SDM

kompeten sebagai menunjang pengelolaan dana dan sumber daya desa yang bertanggung jawab agar tujuan organisasi dapat tercapai (Ilhami & Widhiastuti, 2022). Kompetensi SDM mengacu pada kemampuan individu untuk melaksanakan tugas, amanah, dan fungsinya sedemikian rupa sehingga mencapai tujuan. Oleh karena itu, diperlukan kapasitas SDM yang dapat mempermudah pengelolaan sumber daya desa untuk mencapai tujuan negara. Hasil riset Pahlawan et al. (2020) menunjukkan bahwa kapasitas SDM berpengaruh terhadap akuntabilitas dalam mengelola keuangan desa, hal ini tidak berbeda dengan Sundanah et al. (2023) yang berkata sebaliknya.

Teori *Stewardship* Donaldson et al. (1991) mengemukakan bahwa hal yang diprioritaskan adalah hasil dari sebuah organisasi tanpa mementingkan kepentingan individunya. Tingkat pendidikan dan pengalaman merupakan salah satu cara aparatur pengelola dana desa dalam memperoleh pengetahuan dan beradaptasi dalam mengelola dana desa. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan semakin baik pemahamannya dalam mengelola dana desa sehingga pengelolaan dana desa yang dihasilkan baik. Adapun tingkat pendidikan di kota Sungai Penuh dapat di lihat pada tabel berikut.

**Tabel 2. Angkatan Kerja Menurut Pendidikan yang ditamatkan dan Kegiatan Utama di Kota Sungai Penuh (Jiwa), 2019-2022**

Pendidikan	Angkatan Kerja Menurut Pendidikan yang ditamatkan dan Kegiatan Utama di Kota Sungai Penuh (Jiwa)			
	Bekerja		Pengangguran	
	2022	2019	2022	2019
SD/Tidak Tamat SD/Tidak Sekolah	5.637	9.197	45	138
SMP	4.742	6.325	126	155
SMA Umum	6.439	9.930	251	577
SMA Kejuruan	3.283	3.884	37	271
Diploma I/II/III	1.265	3.344	0	55
Universitas	4.638	9.126	171	624
Jumlah	26.004	41.806	630	1.820

Sumber : *Data BPS Kota Sungai Penuh*

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa angkatan kerja yang paling banyak adalah tamatan SMA Umum yaitu 6.439 jiwa dan disusul oleh SD/Tidak tamat SD/Tidak Sekolah di angka 5637 jiwa. Sehingga diketahui bahwa kebanyakan yang bekerja baik adalah mereka tamatan SMA Umum dan SD/Tidak tamat SD/Tidak Sekolah. Tingkat pendidikan aparat desa yang rendah menyebabkan pengelolaan anggaran dana desa tidak maksimal. Pada studi tersebut juga dipaparkan bahwa tingkat pendidikan aparat desa berpengaruh dalam memahami laporan keuangan. Hardiningsih et al. (2020)

menyatakan kompetensi yang didukung dengan tingkat pendidikan yang sesuai akan membantu perwujudan akuntabilitas pengelolaan dana desa di setiap tahapannya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi, aparat desa dapat dengan mudah memahami ketentuan dan peraturan yang berlaku terutama peraturan terkait pengelolaan dana desa (Cahyani et al., 2019). Tingkat pendidikan menguatkan pengaruh kompetensi aparat desa terhadap pengalokasian dana desa (Hardiningsih et al., 2020).

Akuntabilitas pengelolaan dana desa masih rendah, dan berbagai faktor

menyebabkan penyalahgunaan dan penyelewengan dana desa. Berdasarkan penelitian Dewi & Gayatri (2019), dan Syahputra (2019), disimpulkan terdapat perbedaan pada penelitiannya. Perbedaan itu dapat diketahui berdasarkan teori dan variabel independen yang digunakan. Pada penelitian Gayatri dan Dewi (2019), variabel bebas (X) berupa kepemimpinan, kompetensi, dan partisipasi masyarakat, dan landasan teori yang digunakan adalah teori keagenan. Variabel independen pada penelitian adalah komitmen, kompetensi, keterlibatan komunitas, dan penggunaan TI dengan mempergunakan teori manajemen dan teori penetapan tujuan. Selain itu, menurut Syahputra (2019), variabel independen yang digunakan adalah kompetensi, transparansi, dan partisipasi masyarakat melalui teori *Stewardship*.

Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa variabel, yaitu Seskeudes, Kompetensi SDM dan SPI pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan APBDes. Semua penelitian memberikan hasil yang berbeda dan kontradiktif. Artinya, beberapa penelitian menunjukkan dampak positif, sementara penelitian lainnya menunjukkan hasil negatif. Dalam penelitian sebelumnya, jarang ditemukan tingkat pendidikan digunakan sebagai *moderating variable*. Peneliti juga memiliki pendapat sendiri kenapa memilih APBDes. Ini didasarkan bahwa APBDes punya dampak yang drastis dalam membangun desa. Hal lain yaitu riset tentang Seskeudes, Kompetensi SDM dan SPI pemerintah serta akuntabilitas kelola APBDes di Kota Sungai Penuh karena peneliti ingin Seskeudes, SDM dan SPI serta akuntabilitas dari pengelolaan APBDes di Kota Sungai Penuh. Oleh sebab yang telah diuraikan di atas, maka penulis

ingin mengadakan riset dengan judul “Analisis Seskeudes, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja dengan Tingkat Pendidikan sebagai Variabel Moderasi (Studi Pemerintah Desa di Kota Sungai Penuh”.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ialah riset kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah Pemerintah Desa di Kota Sungai Penuh. Sampel dalam penelitian ini menggunakan seluruh populasi yang ada. Jadi ada 207 responden yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dan berdasarkan pendekatan kausal. Pendekatan kausal merupakan pendekatan penelitian yang menguji pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain (Cooper & Schindler, 2014). Sumber datanya adalah data primer dan data sekunder, dan data tersebut diperoleh melalui kuesioner dan observasi pada pemerintahan desa di Kota Sungai Penuh.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN**

### **Evaluasi Model Struktural (*Inner Model*)**

#### ***Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)***

Ukuran yang paling umum digunakan untuk mengevaluasi model struktural adalah koefisien determinasi (nilai R<sup>2</sup>). Koefisien ini adalah ukuran kekuatan prediksi model dan dihitung sebagai korelasi kuadrat antara nilai aktual dan prediksi konstruk endogen tertentu (J. Hair et al., 2017). Jika nilai R *square* 0,75; 0,50; dan 0,25 menunjukkan bahwa model kuat, moderat, dan lemah (J. Hair et al., 2017).

**Tabel 3. Uji R Square**

	<b>R Square</b>	<b>R Square Adjusted</b>
<b>Y</b>	0,883	0,880

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa adjusted R square model dalam penelitian memiliki nilai sebesar 0,880, artinya kemampuan variabel eksogen dalam menjelaskan Y sebesar 88% (kuat) sehingga dikatakan bahwa kemampuan variabel SESKEUDES, Kompetensi SDM dan SPIP dalam menjelaskan Akuntabilitas Pengelolaan APBDes kuat yaitu 88%, sedangkan sisanya 12 % merupakan pengaruh variabel independen lain yang tidak diukur dalam penelitian ini.

### **Predictive Relevance (Q<sup>2</sup>)**

*Cross-validated redundancy* (Q<sup>2</sup>) atau *Q-square test* digunakan untuk menilai *predictive relevance*. Nilai Q<sup>2</sup> > 0 menunjukkan bahwa model mempunyai *predictive relevance* yang akurat terhadap konstruk tertentu sedangkan nilai Q<sup>2</sup> < 0 menunjukkan bahwa model kurang mempunyai *predictive relevance* (J. Hair et al., 2017).

**Tabel 4. Q Square**

	SSO	SSE	Q <sup>2</sup> (=1-SSE/SSO)
X1	1800.000	1800.000	
X2	1800.000	1800.000	
X3	2520.000	2520.000	
Y	1800.000	614.697	0.659
Z	1800.000	1800.000	

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai Q<sup>2</sup> dalam penelitian ini > 0, sehingga model memiliki *predictive relevance* yang akurat terhadap konstruk.

### **Effect Size f<sup>2</sup>**

Selain mengevaluasi nilai R<sup>2</sup> dari semua konstruk endogen, perubahan nilai R<sup>2</sup> ketika konstruk eksogen tertentu dihilangkan dari model dapat digunakan

untuk mengevaluasi apakah konstruk yang dihilangkan memiliki dampak substantif pada konstruksi endogen. Ukuran ini disebut sebagai ukuran f<sup>2</sup> (J. Hair et al., 2017). Pedoman untuk menilai f<sup>2</sup> yakni nilai 0,02, 0,15, dan 0,35, masing-masing, mewakili efek kecil, sedang, dan besar (J. Hair et al., 2017). Skor f<sup>2</sup> dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5. Effect Size f<sup>2</sup>**

	<b>X1</b>	<b>X2</b>	<b>X3</b>	<b>Y</b>	<b>Z</b>
<b>X1</b>				0,077	
<b>X2</b>				0,138	
<b>X3</b>				<b>0,376</b>	
<b>Y</b>					
<b>Z</b>				0,021	

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Dari tabel diatas dapat dipaparan bahwa nilai f<sup>2</sup> untuk masing masing prediktor seluruhnya di atas 0,02 (>

0,02). Pengaruh Seskeudes dan Kompetensi SDM terhadap Akuntabilitas pengelolaan APBDes pada

kategori lemah, sedangkan pengaruh SPI Pemerintah terhadap Akuntabilitas pengelolaan APBDes pada kategori tinggi.

### Persamaan Regresi

Persamaan regresi adalah sebuah model matematis yang menggambarkan

hubungan antara satu variabel dependen (tergantung) dengan satu atau lebih variabel independen (bebas). Regresi digunakan untuk memperkirakan atau memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen (Ghozali, 2016).

**Tabel 6. Persamaan Regresi**

	<i>Original Sample (O)</i>	<i>Sample Mean (M)</i>	<i>Standard Deviation (STDEV)</i>	<i>TStatistics (O/STDEV)</i>	<i>P Values</i>	<i>Ket</i>
<b>X1 =&gt; Y</b>	0,200	0,204	0,070	2,840	<b>0,005</b>	Positif dan Signifikan
<b>X2 =&gt; Y</b>	0,324	0,329	0,068	4,745	<b>0,000</b>	Positif dan Signifikan
<b>X3 =&gt; Y</b>	0,420	0,413	0,074	5,690	<b>0,000</b>	Positif dan Signifikan
<b>X1 =&gt; Z=&gt;Y</b>	0,037	0,023	0,123	0,301	<b>0,764</b>	Positif dan tidak signifikan
<b>X2 =&gt; Z=&gt;Y</b>	-0,068	-0,059	0,126	0,539	<b>0,590</b>	negatif dan tidak signifikan
<b>X3 =&gt; Z=&gt;Y</b>	0,031	0,037	0,131	0,239	<b>0,811</b>	Positif dan tidak signifikan

Persamaan yang terbentuk berdasarkan nilai koefisien jalur pada tabel di atas adalah sebagai berikut:

$$Y = 0,200X1 + 0,324X2 + 0,420X3 + 0,037(X1 * Z) - 0,068(X2 * Z) + +0,031(X3 * Z)$$

Nilai koefisien pada tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Koefisien Seskeudes terhadap kecenderungan Akuntabilitas APBDes menunjukkan nilai sebesar 0,005 (positif). Arah positif menunjukkan bahwa stimulus searah dengan kecenderungan Akuntabilitas APBDes. Hal ini berarti apabila stimulus meningkat, maka akan dapat meningkatkan kecenderungan Akuntabilitas APBDes.
2. Koefisien Kompetensi SDM terhadap kecenderungan Akuntabilitas APBDes menunjukkan nilai sebesar 0,000 (positif). Arah positif menunjukkan bahwa kapabilitas searah dengan kecenderungan Akuntabilitas APBDes. Hal ini berarti apabila kapabilitas meningkat, maka akan dapat meningkatkan kecenderungan Akuntabilitas APBDes.
3. Koefisien SPI terhadap kecenderungan Akuntabilitas APBDes menunjukkan nilai sebesar

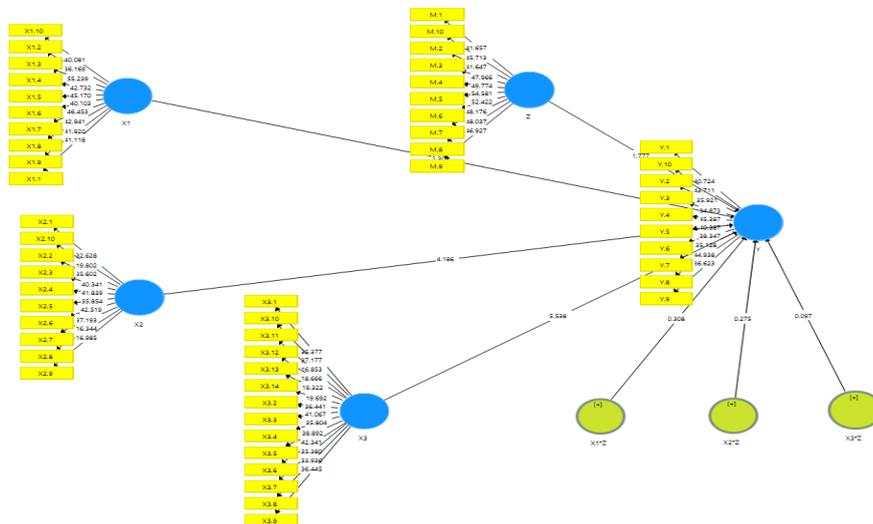
- 0,000 (positif). Arah positif menunjukkan bahwa SPIP searah dengan kecenderungan Akuntabilitas APBDes. Hal ini berarti apabila SPI meningkat, maka akan dapat meningkatkan Akuntabilitas APBDes.
4. Koefisien interaksi Seskeudes dengan tingkat pendidikan terhadap kecenderungan Akuntabilitas APBDes menunjukkan nilai sebesar 0,037 (positif). Arah positif menunjukkan bahwa interaksi Seskeudes dengan tingkat pendidikan searah dengan Akuntabilitas APBDes. Hal ini interaksi Seskeudes dengan tingkat pendidikan, maka akan dapat meningkatkan Akuntabilitas APBDes.
5. Koefisien interaksi Kompetensi SDM dengan tingkat pendidikan terhadap kecenderungan Akuntabilitas APBDes menunjukkan nilai sebesar -0,068 (negatif). Arah negatif menunjukkan bahwa interaksi Kompetensi SDM dengan tingkat pendidikan tidak searah dengan Akuntabilitas APBDes. Hal ini

interaksi Kompetensi SDM dengan tingkat pendidikan, maka akan dapat meningkatkan Akuntabilitas APBDes.

6. Koefisien interaksi SPI dengan tingkat pendidikan terhadap kecenderungan Akuntabilitas APBDes menunjukkan nilai sebesar 0,031 (positif). Arah positif menunjukkan bahwa interaksi SPI dengan tingkat pendidikan searah dengan Akuntabilitas APBDes. Hal ini interaksi SPI dengan tingkat pendidikan, maka akan dapat meningkatkan Akuntabilitas APBDes.

**Pengujian Hipotesis**

Hasil pengujian hipotesis ini dapat dinyatakan diterima jika nilai *p-values* lebih kecil dari 0,05 atau nilai *t* lebih besar dari 1,96 (J. . Hair et al., 2017). Berdasarkan pertanyaan penelitian dan hipotesis, terdapat 6 (enam) pengujian yang dilakukan, di antaranya 3 (tiga) berupa pengaruh langsung antara variabel eksogen terhadap endogen, sedangkan 3 (tiga) berupa pengaruh tidak langsung variabel tingkat pendidikan terhadap Akuntabilitas pengelolaan APBDes. Pengujian model struktural dapat dilihat pada gambar berikut ini:



**Gambar 1. Diagram Model Struktural**

**Pengaruh Langsung (Path Coefficient)**

Hipotesis pertama memiliki nilai *p-value* sebesar 0,005 (< 0,05) dan nilai *t*-statistik sebesar 2,840 (>1,96). Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel Implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) berpengaruh positif dan signifikan terhadap terhadap Akuntabilitas APBDes. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa H<sub>01</sub> ditolak dan H<sub>a1</sub> diterima. Pengaruh langsung Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) terhadap Akuntabilitas APBDes sebesar 0,200 yang artinya jika dimensi Seskeudes meningkat maka

menyebabkan tingginya Akuntabilitas sebesar 20%.

Hipotesis kedua memiliki nilai *p-value* sebesar 0,000 (< 0,05) dan nilai *t*-statistik sebesar 4,745 (>1,96). Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel Kompetensi SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap terhadap Akuntabilitas APBDes. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa H<sub>02</sub> ditolak dan H<sub>a2</sub> diterima. Pengaruh langsung Kompetensi SDM terhadap Akuntabilitas APBDes sebesar 0,324 yang artinya jika dimensi Kompetensi

SDM meningkat maka menyebabkan tingginya Akuntabilitas sebesar 32,4%.

Hipotesis ketiga memiliki nilai *p-value* sebesar 0,000 ( $< 0,05$ ) dan nilai *t-statistik* sebesar 5,690 ( $> 1,96$ ). Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel SPI berpengaruh positif dan signifikan terhadap terhadap Akuntabilitas APBDes. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa  $H_{03}$  ditolak dan  $H_{a3}$  diterima. Pengaruh langsung SPI terhadap Akuntabilitas APBDes sebesar 0,324 yang artinya jika dimensi SPI meningkat maka menyebabkan tingginya Akuntabilitas sebesar 42%.

#### **Pengaruh Tidak Langsung (*Indirect Effect*)**

Hipotesis keempat memiliki nilai *p-value* sebesar 0,764 ( $> 0,05$ ) dan nilai *t-statistik* sebesar 0,301 ( $< 1,96$ ). Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel Seskeudes berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap terhadap Akuntabilitas APBDes dengan tingkat pendidikan sebagai variabel moderasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa  $H_{04}$  diterima dan  $H_{a4}$  ditolak. Pengaruh tidak langsung Seskeudes terhadap Akuntabilitas APBDes dengan tingkat pendidikan sebagai variabel moderasi sebesar 0,037 yang artinya jika dimensi Seskeudes terhadap Akuntabilitas APBDes dengan tingkat pendidikan sebagai variabel moderasi

maka menyebabkan tingginya Akuntabilitas sebesar 3,7%.

Hipotesis kelima memiliki nilai *p-value* sebesar 0,590 ( $> 0,05$ ) dan nilai *t-statistik* sebesar 0,539 ( $< 1,96$ ). Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel Kompetensi SDM berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap terhadap Akuntabilitas APBDes dengan tingkat pendidikan sebagai variabel moderasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa  $H_{05}$  diterima dan  $H_{a5}$  ditolak.

Hipotesis keenam memiliki nilai *p-value* sebesar 0,844 ( $> 0,05$ ) dan nilai *t-statistik* sebesar 0,239 ( $< 1,96$ ). Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel SPI berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap terhadap Akuntabilitas APBDes dengan tingkat pendidikan sebagai variabel moderasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa  $H_{06}$  diterima dan  $H_{a6}$  ditolak. Pengaruh tidak langsung SPI terhadap Akuntabilitas APBDes dengan tingkat pendidikan sebagai variabel moderasi sebesar 0,031 yang artinya jika dimensi SPI terhadap Akuntabilitas APBDes dengan tingkat pendidikan sebagai variabel moderasi maka menyebabkan tingginya Akuntabilitas sebesar 3,1%.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka rincian hasil hipotesis pada penelitian ini ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 7. Hasil Hipotesis Penelitian**

<b>Hipotesis</b>	<b>Pernyataan</b>	<b>Hasil</b>
H <sub>1</sub>	Implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) berpengaruh positif terhadap APBDes	Diterima
H <sub>2</sub>	Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas APBDes	Diterima
H <sub>3</sub>	Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas APBDes	Diterima
H <sub>4</sub>	Tingkat Pendidikan Memoderasi Pengaruh SISKEUDES Terhadap Akuntabilitas APBDes	Ditolak
H <sub>5</sub>	Tingkat Pendidikan Memoderasi Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas APBDes	Ditolak

---

H<sub>6</sub> Tingkat Pendidikan Memoderasi Pengaruh Pengaruh Ditolak  
SPI Pemerintah Terhadap Akuntabilitas APBDes

---

Sumber : data diolah peneliti, 2024

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh langsung positif yang signifikan dari Implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) terhadap terhadap Akuntabilitas Pengelolaan APBDes di Lingkup Pemerintahan Desa Kota Sungai Penuh. Hal ini menunjukkan jika dimensi Seskeudes meningkat maka menyebabkan tingginya nilai Akuntabilitas Pengelolaan APBDes.
2. Terdapat pengaruh langsung positif yang signifikan dari Implementasi Kompetensi SDM terhadap terhadap Akuntabilitas Pengelolaan APBDes di Lingkup Pemerintahan Desa Kota Sungai Penuh. Hal ini menunjukkan jika dimensi Kompetensi SDM meningkat maka menyebabkan tingginya nilai Akuntabilitas Pengelolaan APBDes.
3. Terdapat pengaruh langsung positif yang signifikan dari Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap terhadap Akuntabilitas Pengelolaan APBDes di Lingkup Pemerintahan Desa Kota Sungai Penuh. Hal ini menunjukkan jika dimensi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah meningkat maka menyebabkan tingginya nilai Akuntabilitas Pengelolaan APBDes.
4. Tidak terdapat pengaruh tidak langsung positif yang signifikan dari Implementasi Seskeudes terhadap Akuntabilitas Pengelolaan APBDes dengan tingkat pendidikan sebagai variabel moderasi di Lingkup Pemerintahan Desa Kota Sungai Penuh.

5. Tidak terdapat pengaruh tidak langsung positif yang signifikan dari Implementasi Kompetensi SDM terhadap Akuntabilitas Pengelolaan APBDes dengan tingkat pendidikan sebagai variabel moderasi di Lingkup Pemerintahan Desa Kota Sungai Penuh.
6. Tidak terdapat pengaruh tidak langsung positif yang signifikan dari Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan APBDes dengan tingkat pendidikan sebagai variabel moderasi di Lingkup Pemerintahan Desa Kota Sungai Penuh.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arfiansyah, A., Tinggi, S., Islam, A., Astuti, M., & Pendahuluan, W. (2020). *Journal of Islamic Finance and Accounting Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. *Journal of Islamic Finance and Accounting*, 3(1), 67–82. <http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/jifa>
- Budiana, D. A., Said, D., & -, N. (2019). *The Effect Of Village Device Competencies And Internal Control System On Accountability Of Village Management*. *Scientific Research Journal*, VII(I). <https://doi.org/10.31364/scirj/v7.i1.2019.p0119599>
- Cahyani, A., Supriatna, A., Somantri, M. S., Yuningsih, T., & Sudrajat, A. R. (2019). *Analisis Sistem Administrasi di Badan Usaha*

- Milik Desa Wibawa Mukti Desa Sekarwangi Kabupaten Sumedang. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(2), 203–212. <https://doi.org/10.34007/jehss.v2i2.83>
- Cooper, D. R., & Schindler, P. S. (2014). *Business Research Methods*. McGraw-Hill Education. <https://books.google.co.id/books?id=fly6DAEACAAJ>
- Dewi, N. K. A. J. P., & Gayatri, G. (2019). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 1269. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i02.p16>
- Donaldson, L., Davis, J. H., Argyris, C., Chandler, A., Etzioni, A., Hage, J., McCloskey, D., Olson, M., Perrow, C., Tricker, R., & Whetten, D. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. In *Australian Journal of Management* (Vol. 16).
- Dwita Eprilsa, S., Setyo Budiwitjaksono, G., Pembangunan, U., Veteran, N., & Timur, J. (2022). Analysis Of The Quality Of Human Resources, And The Government's Internal Control System (Spip) On The Effectiveness Of The Use Of The Village Financial System (Siskeudes) Analisis Kualitas Sumber Daya Manusia, Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Spip) Terhadap Efektivitas Penggunaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). <http://pemdebugoharjo.blogspot.com/>
- Fajri, R., Agusti, R., & Julita. (2021). Pengaruh Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparatur Desa, Dan Pemahaman Regulasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Al-Iqtishad*, 7(No. 2), 209–227.
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS, 25.
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). Partial least squares konsep, teknik dan aplikasi menggunakan program smartpls 3.0 untuk penelitian empiris. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 4(1).
- Hardiningsih, P., Udin, U., Masdjojo, G. N., & Srimindarti, C. (2020). Does competency, commitment, and internal control influence accountability? *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(4), 223–233. <https://doi.org/10.13106/JAFEB.2020.VOL7.NO4.223>
- Hendaris, R. B., & Siraz, R. (2020). Analysis Of Factors Influencing The Accountability Of Village Funds Management. *DIJEMSS*, 1(3), 400–411. <https://doi.org/10.31933/DIJEMSS>
- Ilhami, M., & Widhiastuti, R. (2022). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Laporan Dana Desa. *JPAK: Jurnal Pendidikan Akuntansi Dan Keuangan*, 10(2), 185–198. <https://doi.org/10.17509/jpak.v10i2.43386>
- Luthfiani, B., Asmony, T., & Herwanti, R. (2020). Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi

- Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Lombok Tengah. *E-Jurnal Akuntansi*, 30, 1886.  
<https://doi.org/10.24843/EJA.2020.v30.i07.p20>
- Martini, R., Lianto, N., Hartati, S., Zulkifli, Z., Widyastuti, E., Akuntansi, J., Jurnal, W., & Akuntansi, A. (2019). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Kecamatan Sembawa. <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jaa>
- Nur, M., Sawitri, A., & Prastiti, D. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa. In *Jurnal Akuntansi Aktual* (Vol. 6, Issue 2).
- Pahlawan, E. W., Wijayanti, A., & Suhendro, S. (2020). Pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 162. <https://doi.org/10.32400/iaj.29261>
- Puspa, D. F., & Prasetyo, R. A. (2020). Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 20(2), 281–298. <https://doi.org/10.25105/mraai.v20i2.7894>
- Puspa, D., & Prasetyo, R. (2020). Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 20, 281. <https://doi.org/10.25105/mraai.v20i2.7894>
- Rifa'i, M., Jubertus, J., & Susanti, R. A. D. (2021). Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Kepatuhan Pajak, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:245645431>
- Santoso, P. L., Suprihati, & Ningsih, S. (2022). The Effect Of Village Apparatus Competence, Internal Control System, And Organizational Commitments On Village Fund Management Accountability (Case Research in Banyudono District). *Business and Accounting Research (IJE BAR) Peer Reviewed-International Journal*, 6(3), 1233–1234. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/IJE BAR>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Dan, Kuantitatif*.
- Sugiyono, P. D. (2019). *metode penelitian pendidikan (kuantitatif, kualitatif, kombinasi, R&D dan penelitian pendidikan)*. *Metode Penelitian Pendidikan*, 67.
- Sundanah, Pravasanti, Y. A., & Pardanawati, S. L. (2023). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana. *Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis*, 2(1), 222–236. <https://doi.org/10.53088/jikab.v2i1.31>

- Syahputra, R. T. (2019). Pengaruh Transparansi, Kompetensi Perangkat Desa, Dan Partisipasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris pada Desa di Kabupaten Purworejo). <http://eprints.upnyk.ac.id/20504/>
- Yunni, Y., Azlina, N., & Nurulita, S. (2022). Effect Of Transparency, Human Resources Competence, Community Participation, Government Internal Control System, Village Apparatur Commitment To Management Village Fund: (Empirical Study on Villages in Meranti Islands District). *Terbuka Journal of Economics and Business*, 3, 1–10. <https://doi.org/10.33830/tjeb.v3i2.3738>